

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2017  
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099064/2017**

**Revisi ke 01**  
Tanggal : 30 November 2017

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017.

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- |                               |            |   |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (005)    | MAHKAMAH AGUNG  |
| 2. Unit Organisasi            | : (03)     | DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  |
| 3. Provinsi                   | : (01)     | DKI JAKARTA   |
| 4. Kode>Nama Satker           | : (099064) | PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT   |
| Sebesar                       | : Rp.      | 560.490.000 ( LIMA RATUS ENAM PULUH JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum  
005.03.07.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

	Jumlah Uang
	Rp. 560.490.000
	Rp. 560.490.000

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	560.490.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

- |                    |           |             |
|--------------------|-----------|-------------|
| 1. KPPN JAKARTA VI | (175) Rp. | 560.490.000 |
|--------------------|-----------|-------------|

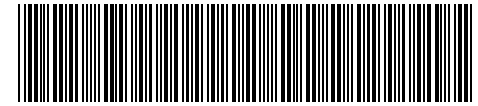
**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

A.N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2017  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099064/2017  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0301-2985-3000-4826

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (099064) PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Kuasa Pengguna Anggaran : Rosfiana, SH.,MH  
Bendahara Pengeluaran : Shanti Haryanti, S.Kom.  
Pejabat Penanda Tangan SPM : Yustisia Anas, SE., MH.

Halaman : I A. 1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN		560.490.000
Sub Fungsi	03.04	PERADILAN		560.490.000
2 Program	005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		560.490.000
Hasil (Outcome)	01	Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum		
IKU Program	01	Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel		
	02	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan peradilan umum		
	03	Terselenggaranya pembinaan tenaga teknis peradilan umum		
	04	Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Kasasi, PK dan Grasi		
Kegiatan	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		560.490.000
Indikator Kinerja Kegiatan	001	Pedoman Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum		
	002	Jumlah Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum		
	003	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan		
	004	Jumlah Penyelesaian Perkara PHI (di bawah 150 jt) di Lingkungan Peradilan Umum		
	005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara		
	006	Tenaga Teknis Peradilan Umum yang Kompeten dibidang Gugatan Sederhana (SCC) dan SIPP		
	007	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu		
	008	Penyelesaian Perkara Perikanan		
	009	Pelaksanaan SPPT/SPPA/MEDIASI/SCC		
Keluaran (Output)	1049.003	Pos Bantuan Hukum	720,00 Jam Layanan	72.000.000
	1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	100,00 Perkara	486.750.000
	1049.006	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan biaya perkara	10,00 Perkara	1.740.000

Direktur Jenderal Badilum

ttd.

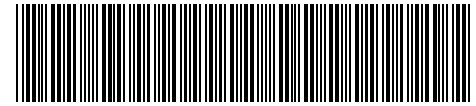
Herri Swantoro, SH, MH  
195909041984031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2017**

**NOMOR : DIPA- 005.03.2.099064/2017**

**I B. SUMBER DANA**



DS:0301-2985-3000-4826

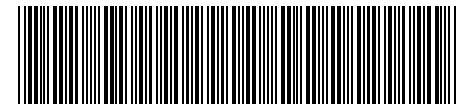
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
 Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
 Kode>Nama Satker : (099064) PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

				Pagu			Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2017	Rp.	560.490.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
1. Rupiah Murni	Rp.	560.490.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0	
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0	
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2017  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099064/2017  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0301-2985-3000-4826

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (099064) PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
099064	PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT	-	560.490	-	-	-	560.490		
005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	560.490	-	-	-	560.490		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	560.490	-	-	-	560.490		
1049.003	Pos Bantuan Hukum	-	72.000	-	-	-	72.000	01 . 53	
01	RM	-	72.000	-	-	-	72.000	175	
1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	-	486.750	-	-	-	486.750	01 . 53	
01	RM	-	486.750	-	-	-	486.750	175	
1049.006	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan biaya perkara	-	1.740	-	-	-	1.740	01 . 53	
01	RM	-	1.740	-	-	-	1.740	175	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>560.490</b>	-	-	-	<b>560.490</b>		

Direktur Jenderal Badilum

ttd.

Herri Swantoro, SH, MH  
195909041984031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2017  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099064/2017  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0301-2985-3000-4826

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (099064) PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	099064	PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	0	0	0	95.908	0	0	47.748	0	48.403	146.337	140.307	81.787	560.490
		<b>52 BELANJA BARANG</b>	0	0	0	95.908	0	0	47.748	0	48.403	146.337	140.307	81.787	560.490
	005.03.07.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	0	0	0	95.908	0	0	47.748	0	48.403	146.337	140.307	81.787	560.490
		52 BELANJA BARANG	0	0	0	95.908	0	0	47.748	0	48.403	146.337	140.307	81.787	560.490

Direktur Jenderal Badilum

ttd.

Herri Swantoro, SH, MH  
195909041984031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2017  
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099064/2017  
IV. C A T A T A N**



DS:0301-2985-3000-4826

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
Provinsi : [01] DKI JAKARTA  
Kode dan Nama Satker : [099064] PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Halaman : IV. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Direktur Jenderal Badilum

ttd.  
Herri Swantoro, SH, MH  
195909041984031004